



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## EVALUASI KEBIJAKAN HARGA GAS BUMI TERTENTU

**T. Ade Surya**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teuku.surya@dpr.go.id](mailto:teuku.surya@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah masih belum memutuskan kepastian kelanjutan pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas bumi subsidi sebesar USD6 per *metric million british thermal unit* (mmbtu) untuk tujuh sektor industri tertentu, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas kebijakan HGBT tersebut, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian masih berbeda pandangan terkait perlu tidaknya kebijakan ini dilanjutkan setelah tahun 2024, sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri bahwa kebijakan HGBT akan berakhir per tanggal 31 Desember 2024. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan kedua belah pihak yang perlu dievaluasi lebih jauh sebelum diambil keputusan terkait kelangsungan kebijakan HGBT.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, menyampaikan agar kebijakan HGBT dapat dilanjutkan dan bahkan diperluas penerima manfaatnya. Alasannya, dari total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik pada tahun 2021-2023, yaitu sebesar Rp51,04 triliun, menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional sebesar Rp157,2 triliun. Kebijakan HGBT terbukti memberikan manfaat dan *multiplier effect* yang besar khususnya dari sisi ekspor, pendapatan pajak, investasi, dan pengurangan subsidi pupuk. Dari kebijakan HGBT tersebut pada tahun 2021-2023, tujuh sektor industri penerima manfaat HGBT mampu meningkatkan nilai tambah ekspor sebesar Rp84,98 triliun, dengan nilai ekspor terbesar dari sektor industri oleokimia, yaitu Rp48,49 triliun. Selain itu, pendapatan pajak meningkat sebesar Rp27,81 triliun, mendorong investasi baru sebesar Rp31,06 triliun, dan menurunkan subsidi pupuk sebesar Rp13,33 triliun. Jika kebijakan HGBT tidak dilanjutkan maka terdapat *opportunity lost* bagi industri yang berpotensi menurunkan ekonomi, penutupan pabrik, dan bahkan pemutusan hubungan kerja. Para pelaku industri pun mengharapkan agar kebijakan HGBT dapat terus dilanjutkan. Bagi pelaku industri, harga gas bumi yang lebih murah dapat meningkatkan efisiensi produksi, baik gas bumi yang dimanfaatkan untuk bahan baku industri maupun sebagai energi operasional.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mempertimbangkan ketersediaan gas bumi apakah mencukupi atau tidak untuk melanjutkan kebijakan HGBT, termasuk dengan kemampuan negara. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terkait dengan serapan gas bumi oleh sektor industri penerima manfaat HGBT yang selama ini realisasinya tidak mencapai 100% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa pihak pun menyampaikan pendapatnya yang cenderung mendukung agar kebijakan HGBT tidak dilanjutkan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai bahwa tujuan pemerintah memberikan harga gas bumi subsidi untuk tujuh sektor industri tertentu sebenarnya cukup bagus. Namun, dampaknya terhadap penerimaan negara yang menurun juga perlu diperhatikan. Peningkatan pendapatan pajak dari sektor industri penerima manfaat HGBT tidak sebanding dengan penurunan penerimaan

negara dari berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari gas bumi dalam volume tertentu. Daya saing industri pun pada dasarnya tidak ditentukan oleh faktor tunggal seperti harga gas bumi, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang perlu menjadi perhatian dari kebijakan HGBT adalah keseimbangan di industri migas. Walaupun Kebijakan HGBT memberikan nilai tambah bagi sektor industri penerima manfaat, di saat yang sama kebijakan ini menekan industri *upstream*, *midstream*, dan *downstream* migas. Terlebih, pandemi Covid-19 sudah berlalu dan pertumbuhan ekonomi relatif terjaga. Keberlanjutan industri migas dari *upstream* hingga *downstream* perlu dijaga keseimbangannya supaya rantai pasok berjalan baik.

Pada prinsipnya, terdapat *trade off* dari implementasi kebijakan HGBT antara meningkatnya daya saing industri dan menurunnya penerimaan negara dari sektor migas. Jika orientasinya adalah meningkatkan daya saing industri tentu kebijakan HGBT perlu dilanjutkan. Namun, pertimbangan Kementerian Keuangan dari sisi penyesuaian penerimaan negara atas implementasi kebijakan HGBT juga perlu diperhatikan. Jika kebijakan HGBT tetap dilanjutkan maka harus dipastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu kesehatan fiskal.

## Atensi DPR

Kepastian kelanjutan pelaksanaan kebijakan HGBT yang berakhir per tanggal 31 Desember 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah. Beberapa pertimbangan masih perlu dievaluasi lebih lanjut sebelum diambil keputusan terkait kelangsungan kebijakan ini. Kebijakan HGBT terbukti memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Namun di sisi lain, kebijakan ini menurunkan penerimaan negara dari sektor migas. Komisi VII DPR RI perlu meminta pemerintah melakukan evaluasi dan riset secara mendalam terkait dengan kebijakan HGBT yang telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama mengenai dampaknya terhadap daya saing industri maupun terhadap penerimaan negara. Komisi VII DPR RI juga perlu meminta pemerintah mempertimbangkan opsi impor gas bumi murah untuk kebutuhan sektor industri jika kebijakan HGBT tidak dilanjutkan.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 27 Maret 2024;  
ekonomi.bisnis.com, 24 Maret 2024;  
kompas.id, 25 Maret 2024; dan  
*Kontan*, 25 dan 27 Maret 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024